

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP “GOOD GOVERNANCE” APARAT DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

¹Tomi Irdiansyah, ²Arie Ramadhani, ³Moh Sabiq Irwan H

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Banyuwangi

e-mail: 1irdiansyahtomi693@gmail.com, 2arieramadhani@unibabwi.ac.id, 3mohsabiqrwan@unibabwi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat desa serta persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap warga dari lima dusun, yaitu Seruni, Sangkur, Kelir, Mulyosari, dan Krajan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat desa secara umum dinilai cukup baik, dengan adanya pelayanan administrasi yang cepat, keterbukaan dalam forum musyawarah, responsivitas terhadap keluhan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan. Aparat desa juga telah mengupayakan penerapan prinsip *Good Governance*, seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, *Good Governance*, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas,

Abstract

This study aims to analyze the performance of village officials and community perceptions of the implementation of Good Governance principles in Bunder Village, Kabat District, Banyuwangi Regency. The study used a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with residents of five hamlets: Seruni, Sangkur, Kelir, Mulyosari, and Krajan. The results indicate that the performance of village officials is generally considered quite good, with prompt administrative services, openness in deliberation forums, responsiveness to community complaints, and the implementation of development and empowerment programs. Village officials have also strived to implement Good Governance principles, such as participation, transparency, responsiveness, and accountability.

Keywords: Public Perception, *Good Governance*, Participation, Transparency, Accountability



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa merupakan sistem dari berbagai sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya (Moch Solekhan, 2014, hlm.67)

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan

pembangunan berbasis masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menempatkan desa bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, kinerja aparat desa menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya desa secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja aparat desa tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Konsep *good governance* telah menjadi acuan utama dalam reformasi birokrasi dan pemerintahan di berbagai tingkat, termasuk di tingkat desa. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat. Namun, implementasi *good governance* di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan, serta kapasitas sumber daya manusia aparat desa yang masih terbatas.

Kinerja aparat desa tidak hanya dapat dinilai dari indikator administratif atau laporan kegiatan formal, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menilai dan merasakan langsung hasil dari kinerja tersebut. Persepsi masyarakat menjadi indikator penting karena masyarakat adalah penerima utama layanan publik yang diberikan oleh aparat desa. Jika masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses informasi yang memadai, dan menerima layanan yang baik, maka hal itu menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam konteks lokal, Desa Bunder yang terletak di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu desa yang cukup berkembang secara sosial dan ekonomi. Dengan beragam program pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat desa dinilai oleh masyarakatnya sendiri. Apakah aparat desa telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip *good governance*? Apakah masyarakat merasa puas dengan pelayanan dan keterlibatan dalam pemerintahan desa?

Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, karena pemahaman terhadap persepsi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk perbaikan dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kinerja aparat desa, tetapi juga ingin mengungkap sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kualitas pemerintahan desa mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana kinerja aparat desa di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dan (2) bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja tersebut dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Pemerintahan desa merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

pelayanan publik. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini membuka peluang bagi desa untuk lebih mandiri, inovatif, dan partisipatif dalam membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, otonomi desa ini juga membawa konsekuensi berupa tuntutan terhadap profesionalisme dan akuntabilitas aparat desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam praktiknya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kinerja aparat desa sebagai pelaksana utama. Aparat desa dituntut tidak hanya untuk memahami regulasi dan tugas administrasi, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemerintahan dan pelayanan publik.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka pemerintahan yang demokratis, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dapat terwujud.

Penerapan *good governance* di tingkat desa menjadi sangat krusial mengingat desa adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Sayangnya, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa persoalan yang sering muncul di lapangan antara lain lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparat desa. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi citra dan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan di mata masyarakat.

Penilaian terhadap kinerja aparat desa tidak hanya dapat dilakukan melalui indikator administratif atau laporan kegiatan, tetapi juga perlu dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan dampak kebijakan dan pelayanan pemerintah desa. Persepsi masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai apakah aparat desa telah melaksanakan tugasnya sesuai harapan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, tidak transparan, atau kurang melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *good governance* belum berjalan dengan baik.

Desa Bunder, yang terletak di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu desa yang terus berkembang dalam berbagai aspek, baik fisik maupun sosial. Sebagai bagian dari upaya pembangunan yang merata dan berkeadilan, pemerintah desa Bunder secara aktif melaksanakan program-program yang didanai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, tentu dibutuhkan aparat desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan pelayanan publik. Namun, sejauh mana aparat desa di Desa Bunder melaksanakan prinsip *good governance* dalam menjalankan tugasnya, dan bagaimana masyarakat menilai hal tersebut, masih menjadi pertanyaan yang penting untuk dikaji.

Tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima dari aparat desa perlu diimbangi dengan evaluasi kinerja yang objektif dan partisipatif. Penilaian terhadap kinerja aparat desa dari sisi masyarakat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas telah dirasakan secara langsung. Apakah masyarakat merasa dilibatkan dalam musyawarah desa? Apakah mereka memahami bagaimana anggaran desa digunakan? Apakah aparat desa memberikan pelayanan yang adil dan responsif terhadap

kebutuhan warganya?

Kinerja atau *performance* adalah sebagai sesuatu yang harus dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemauan kerja. Pengertian *performance* dalam arti luas selalu digunakan kata-kata *job performance* atau *work performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi. Pelayanan Masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada publik masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam Upaya peningkatan efektif pelayanan. Masalah nyata yang masih sering terjadi pada proses pelayanan umum/publik yaitu mengenai lambatnya aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan, prosedur pelayanan yang berbelit-libet, sarana prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang dan masih banyak lagi. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. (Mulyadi, 2012, hlm. 51).

Kinerja aparat desa memegang peran strategis dalam membentuk kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di desa, aparat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta memberikan layanan publik yang memadai. Kinerja yang baik dari aparat desa tidak hanya memastikan program-program pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Di desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir memicu peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja aparat desa Bunder. Masyarakat kini lebih kritis dalam mengevaluasi pelayanan yang diberikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Tingginya tuntutan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus meningkatkan kinerja aparat desa agar sesuai dengan harapan masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.

Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat desa semakin terasa adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkatkan kedudukannya di mata masyarakat dan menjadi suatu hak, yaitu suatu hak atas pelayanan. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan dari aparat desa Bunder belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat itu sendiri maupun pemerintah dan pelayanan umum menjadi budaya masyarakat. Masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima pelayanan. Maka dari itu pemerintah desa Bunder melakukan perubahan dengan cara, semua urusan yang berkaitan dengan keterangan apapun bisa melalui *handphone*. Jadi masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus surat keterangan tidak susah payah datang ke kantor desa, terkadang juga masih ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk mengurus surat.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis kinerja aparat desa di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dan juga Mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam menerapkan prinsip *good governance* di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkaya literatur pendidikan karakter di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kata "Persepsi" seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang merujuk pada

proses pemberian arti atau makna terhadap informasi, peristiwa, objek dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan”. Persepsi dapat diartikan sebagai proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif (Anon 2017:Hlm.4)

Persepsi adalah proses mental yang melibatkan penerimaan, pengolahan, dan interpretasi terhadap rangsangan atau informasi yang diterima melalui panca indera. Persepsi bukan hanya tentang bagaimana kita menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga bagaimana kita menafsirkannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan latar belakang individu. Persepsi dapat berbeda dari satu individu ke individu lain karena faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial.

Masyarakat adalah sekumpulan individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut juga dengan kata “*society*” yang artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara Kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi (Prasetyo 2020:Hlm.164)

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip *Good Governance* bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya berlangsung secara adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan umum.

Indikator yang digunakan untuk mengukur *Good Governace* aparat desa bersifat variatif artinya terdapat berbagai indikator sesuai dengan fokus dan konteks penelitian.(Ressi 2018:Hlm.6) *good governance* dapat pula dijadikan indikator pengukuran *Good Governance* yang meliputi:

1. *Participation* (Partisipasi)

Participation (Partisipasi) merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan Kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab kepada kelompoknya. (Kaehe, Ruru, and Rompas 2019:Hlm,2)

2. *Rule Of Law* (Supremasi Hukum)

Rule of law (Supremasi hukum) merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi. *Rule of law* mempunyai ciri berupa jaminan terhadap kepastian aturan hukum serta rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan. (Safitri, Pramomo, and Istiyani 2023:Hlm.4)

3. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi dalam konteks *good governance* adalah prinsip keterbukaan yang memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pramomo, and Istiyani 2023:Hlm.3)

4. *Responsivines* (Tanggung Jawab)

Responsivines (Tanggung Jawab) konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat desa.(Sismono 2020:Hlm.6)

5. *Consensus orientation* (Orientasi konsensus)

Consensus orientation (Orientasi konsensus) merupakan persetujuan dilandasi pada kepentingan bersama. Konsensus harus dilandasi dengan komitmen. Muatan komitmen terkait dengan pengawalan janji atau kesepakatan. Tanpa komitmen yang tinggi, sulit mewujudkan kesatuan janji. (Dewi 2019:Hlm.6)

6. *Equity* (Kesetaraan)

Equity (Kesetaraan) merupakan pemerintah itu harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Pemerintahan Desa Bunder tidak memandang bulu masyarakatnya pemerintah menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. (Calnen 2010:Hlm.13)

7. *Accountability* (Pertanggung jawaban)

Accountability (Pertanggung jawaban) merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah (agent) untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan sesuai tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) karena memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari para agent. (Kaehe et al. 2019:Hlm,2)

8. *Effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi)

Effectiveness (efektivitas) merupakan hubungan antara output dengan tujuan atau dengan kata lain efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan aparat desa Bunder dalam merealisasikan anggaran belanja desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. *Efficiency* (efisiensi) merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah Desa Bunder Kecamatan Kabat. (Samosir 2022:Hlm.5-6)

9. *Strategic vision* (Visi strategis)

Strategic vision (Visi strategis) merupakan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. (Calnen 2010:Hlm.13)

Aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pasal 48 dan 49 aparat desa terdiri dari sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis, yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Metode

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena tersebut, menunjukkan betapa pentingnya meneliti detail dan kedalaman data. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang sering digunakan dalam bidang seperti edukasi, nutrisi, epidemiologi, dan ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang subjek penelitian. Dalam teori dasar, observasi, analisis, dan deskripsi adalah cara untuk menyelesaikan masalah (Adhimah 2020:Hlm.3)

Peneliti mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa di Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Studi ini bertujuan untuk menjadi contoh bagi desa lain untuk memberikan kinerja yang baik bagi masyarakat Bunder persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Temuan dan Pembahasan

Kinerja aparat desa di desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Kinerja aparat desa merupakan cerminan dari bagaimana perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kinerja tersebut dapat dinilai berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta akuntabilitas publik. Menurut Ammons (2018), kinerja sektor publik dapat diukur melalui keberhasilan dalam memenuhi harapan masyarakat, pencapaian program kerja, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap warga dari lima dusun di Desa Bunder, diperoleh gambaran bahwa kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan publik tergolong cukup baik secara umum. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tidak berbelit-belit.
2. Akses terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sosial yang cukup memadai.
3. Respon cepat terhadap gangguan keamanan dan bencana.
4. Pembangunan infrastruktur seperti jalan utama dan air bersih sudah berjalan dengan baik.
5. Program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan pelatihan keterampilan telah dilakukan meskipun belum optimal dari segi keberlanjutan.
6. Layanan informasi dan komunikasi melalui media sosial desa sudah mulai memudahkan warga mengakses informasi penting.

Namun, beberapa temuan menunjukkan kelemahan:

1. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi dari program yang dijalankan.
2. Program pelatihan tidak diikuti oleh dukungan lanjutan seperti alat atau pendampingan.
3. Keterbatasan personel dalam layanan kesehatan pada saat tertentu.
4. Pelayanan terhadap kelompok rentan (misalnya bantuan sosial) kadang belum merata karena pendataan belum maksimal.
5. Pengelolaan potensi pariwisata belum terkonsep secara strategis dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip Good Governance juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja tersebut. Berdasarkan kerangka dari UNESCAP (2020) dan World Bank (2021), prinsip seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas telah diupayakan oleh aparat Desa Bunder. Contohnya, adanya forum musyawarah yang terbuka, pengambilan keputusan secara mufakat, dan respons cepat terhadap keluhan warga (seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan) menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, pendekatan pelayanan aparat desa menunjukkan pergeseran ke arah model New Public Service sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2015), yaitu bahwa birokrasi publik harus melayani masyarakat sebagai warga negara aktif, bukan sekadar pelanggan. Dalam hal ini, aparat desa bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya administrator, yang menyediakan ruang dialog dan menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan kolektif warga.

Namun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa aparat desa perlu meningkatkan kualitas monitoring dan tindak lanjut dari hasil musyawarah. Ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi internal dan pelaporan masih memerlukan penguatan agar program-program yang telah disusun benar-benar berjalan sesuai rencana.

Dengan demikian, kinerja aparat desa Bunder secara umum sudah cukup baik dan sesuai prinsip Good Governance, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek efektivitas

pelaksanaan dan dokumentasi hasil kerja.

Lebih lanjut, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa:

1. Aparat desa melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan kegiatan desa seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sampah, serta kegiatan peringatan hari besar nasional dan pelatihan keterampilan.
2. Informasi disampaikan secara terbuka melalui forum musyawarah, menunjukkan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keputusan diambil secara musyawarah, mencerminkan orientasi pada konsensus dan nilai-nilai lokal.
4. Aparat desa menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan warga, seperti pengadaan bantuan langsung tunai, pelatihan usaha, dan penguatan kegiatan sosial dan budaya.

Dengan demikian, kinerja aparat desa Bunder dapat dikategorikan cukup baik, karena mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan dan pelayanan masyarakat secara aktif dan terbuka.

Aparat desa Bunder telah melaksanakan berbagai program kerja yang mendukung pengembangan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa program yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan antara lain:

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat: Setiap bulan, BPD mengadakan rapat rutin untuk menginventarisasi aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa. Hal ini menciptakan ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dan aparat desa.
2. Penciptaan Keadaan Kondusif: BPD juga berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di desa melalui rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan forpimka. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan kerukunan antar warga, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas sosial di Desa Bunder.
3. Peraturan Desa: Bersama dengan kepala desa, aparat desa turut serta dalam merumuskan peraturan desa, seperti Peraturan Desa tentang APBDes dan pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa aparat desa Bunder tidak hanya fokus pada pelayanan administratif, tetapi juga pada aspek kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

Kinerja aparat desa di Desa Bunder dinilai sangat baik oleh masyarakat. Mereka aktif melibatkan warga dalam musyawarah desa dan transparan dalam pelaksanaan pembangunan. Aparat desa responsif terhadap keluhan masyarakat dan efektif dalam melaksanakan program-program pembangunan. Komunikasi antara aparat desa dan masyarakat berjalan lancar, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan secara transparan. Secara keseluruhan, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat desa.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kinerja aparat desa di Desa Bunder berjalan secara partisipatif, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat. Musyawarah desa bukan hanya formalitas, tetapi menjadi wadah nyata aspirasi warga, di mana masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan musyawarah menunjukkan bahwa aparat desa menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang efektif.

Berbagai program yang dibahas dalam musyawarah menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi (pelatihan produksi gula semut dan kopi), aspek sosial (bantuan langsung tunai), budaya (kegiatan Agustusan, kirim doa), serta lingkungan (kebersihan sungai dan operasi masker). Hal ini menandakan bahwa pendekatan pembangunan di Desa Bunder bersifat menyeluruh dan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pelibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Keterlibatan warga belum tentu menjamin efektivitas jika tidak diimbangi dengan tindak lanjut nyata dari hasil musyawarah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam hal dokumentasi, monitoring, dan pelaporan program yang telah disepakati dalam musyawarah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa akan tetap terjaga, dan kinerja pemerintahan desa akan semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang relevan kinerja aparat Desa Bunder dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance berada pada tingkat yang cukup baik, terutama dalam aspek partisipasi, transparansi, orientasi konsensus, dan kesetaraan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti penegakan hukum yang konsisten, peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan penyebarluasan visi strategis. Perbandingan dengan penelitian terdahulu semakin memperkuat kesimpulan tersebut:

1. Penelitian Dwi Lucita Sari (2016) menunjukkan kinerja aparat desa di tempat lain masih rendah, dengan partisipasi masyarakat yang minim. Hal ini berbeda dengan kondisi di Desa Bunder, di mana masyarakat merasa dilibatkan aktif dan memiliki persepsi positif terhadap kinerja aparat desa.
2. Penelitian Leni Widiyanti (2020) menunjukkan kinerja pemerintahan desa yang baik di Desa Bomo. Kondisi ini sejalan dengan kinerja aparat desa Bunder, di mana pelayanan, pelibatan masyarakat, dan kecepatan respons terhadap kebutuhan warga juga dinilai memadai.
3. Penelitian Donny Prasetyo (2020) menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan kebersamaan dalam masyarakat perdesaan. Hal ini tercermin nyata dalam pola kerja aparat desa Bunder, yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan pendekatan kekeluargaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang optimal, aparat Desa Bunder perlu terus meningkatkan kapasitas birokrasi, melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, dan memperkuat sistem monitoring serta evaluasi internal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Dwi Lucita Sari (2016), temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat di Desa Bunder lebih positif dalam menilai pelayanan publik secara umum. Namun, seperti dalam penelitian Dwi, tetap terdapat ketidakpuasan terhadap efektivitas partisipasi masyarakat.

Penelitian Leni Widiyanti (2020) juga menunjukkan persepsi positif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini senada dengan temuan di Desa Bunder, khususnya dalam aspek pelayanan langsung. Namun, penelitian ini menambahkan temuan baru terkait keterbatasan dalam keberlanjutan program dan pelibatan warga dalam evaluasi.

Penelitian Donny Prasetyo (2020) memberikan kerangka sosiologis mengenai pentingnya interaksi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial. Temuan dalam penelitian ini menguatkan pentingnya penguatan partisipasi substantif, bukan hanya formalitas kehadiran warga.

Persepsi masyarakat tentang kinerja aparat desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Persepsi masyarakat terhadap aparat desa merupakan bentuk penilaian subjektif yang didasarkan pada pengalaman langsung, interaksi sosial, dan informasi yang diterima. Menurut **Schiffman & Wisenblit (2019)**, persepsi adalah proses bagaimana individu menafsirkan dan mengorganisasi informasi dari lingkungan untuk membentuk pemahaman tertentu. Dalam konteks ini, persepsi warga Desa Bunder merefleksikan penilaian terhadap kualitas pelayanan,

keterbukaan pemerintah desa, serta respons terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh orang warga dari lima dusun di Desa Bunder, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa cenderung bersifat apresiatif namun sekaligus kritis. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam pemerintahan desa, sekaligus ketajaman dalam menilai apakah partisipasi tersebut benar-benar bermakna atau sekadar prosedural.

1. Partisipasi Formal, Belum Substantif

Sebagian besar warga menyatakan bahwa mereka diundang dalam musyawarah desa untuk memberikan pendapat. Ini menunjukkan bahwa secara formal, pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi. Namun, warga mengeluhkan bahwa setelah forum berlangsung, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Misalnya, Bapak Saleh dan Bapak Ainul menyebut bahwa usulan mereka tidak diketahui tindak lanjutnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesinambungan antara musyawarah dan pelaksanaan kebijakan desa.

2. Pelibatan Terbatas di Tahap Perencanaan Saja

Warga merasa hanya dilibatkan pada tahap awal (perencanaan), namun tidak saat pelaksanaan atau evaluasi program. Bapak Sutris dan Bapak Abdul Haris menyatakan bahwa dalam pembangunan wisata atau kegiatan desa lainnya, warga hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pemberi masukan atau pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum menyentuh prinsip kolaboratif yang menjadi ciri tata kelola desa yang baik (Good Governance).

3. Tidak Ada Transparansi dan Komunikasi Balik

Masyarakat juga menyoroti lemahnya transparansi. Bapak Nurul, misalnya, mempertanyakan bagaimana proses seleksi peserta pelatihan dilakukan karena tidak ada sosialisasi. Ketiadaan komunikasi balik dari pemerintah desa juga menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme akuntabilitas horizontal antara pemerintah desa danarganya.

4. Program Tidak Berkelanjutan

Beberapa program seperti pelatihan keterampilan hanya dilakukan sekali tanpa ada dukungan lanjutan. Bapak Kholil mengkritik bahwa setelah pelatihan roasting kopi, tidak ada tindak lanjut berupa bantuan alat atau akses pasar. Hal ini menandakan bahwa program desa cenderung simbolik dan tidak dirancang secara berkelanjutan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat.

5. Kurangnya Evaluasi Bersama

Bapak Khoirul menyatakan bahwa kegiatan tahunan seperti perayaan 17 Agustus tidak pernah dievaluasi secara terbuka bersama warga. Akibatnya, program berjalan monoton dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan tidak adanya siklus evaluasi partisipatif yang seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan desa yang responsif.

6. Kritik dari Kelompok Marginal (Perempuan)

Ibu Amelia mengungkapkan bahwa ia tidak dilibatkan dalam validasi data bantuan sosial, padahal ia mengetahui kondisi warga di sekitarnya. Hal ini menunjukkan belum adanya pendekatan inklusif dalam pelibatan warga, terutama dari kelompok perempuan atau warga yang selama ini tidak memiliki akses langsung ke pemerintah desa.

7. Relasi Top-Down Masih Dominan

Sebagian besar responden menilai bahwa pengambilan keputusan masih bersifat dari atas ke bawah. Warga tidak merasa memiliki ruang untuk mempengaruhi arah kebijakan desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip bottom-up planning dalam Good Governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Prinsip Good Governance menjadi salah satu kerangka penting untuk memahami persepsi ini. Seperti yang dijelaskan oleh World Bank (2021), prinsip partisipasi, transparansi, kesetaraan, serta responsivitas akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Warga Desa Bunder merasa aparat desa memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, tidak diskriminatif, serta membuka ruang bagi saran dan kritik.

Lebih jauh, nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan kekeluargaan juga memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap aparat desa. Sebagaimana diuraikan oleh Rachmawati & Hidayah (2021), masyarakat perdesaan memiliki kecenderungan untuk membangun interaksi sosial yang erat, egaliter, dan berbasis kekeluargaan. Hal ini tercermin dalam hubungan aparat dan warga di Desa Bunder yang informal namun saling percaya.

Namun demikian, ada pula sebagian warga yang merasa keterlibatan mereka masih bersifat formalitas, dan beberapa usulan musyawarah belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana hasil partisipasi benar-benar diwujudkan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dari lima dusun di Desa Bunder (Seruni, Sangkur, Kelir, Mulyosari, dan Krajan), dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kinerja aparat desa. Hal ini tercermin dari:

1. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa Hampir seluruh responden menyatakan pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik (jalan, jembatan, irigasi, TPS), kegiatan sosial (peringatan HUT RI, kirim doa leluhur), hingga pemberdayaan ekonomi (pelatihan roasting kopi dan produksi gula semut). Ini mencerminkan bahwa masyarakat merasakan adanya keterbukaan dan kesempatan untuk berpartisipasi, sehingga meningkatkan persepsi positif terhadap kinerja aparat.
2. Kehadiran aparat desa dalam merespons kebutuhan warga Adanya musyawarah yang membahas bantuan langsung tunai dan operasi masker menunjukkan bahwa pemerintah desa tanggap terhadap kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terlebih saat menghadapi situasi krisis atau kebutuhan mendesak. Ini memperkuat persepsi bahwa aparat desa bekerja responsif dan memperhatikan kepentingan warganya.
3. Penerapan nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat Sebagaimana karakteristik masyarakat perdesaan, pola hubungan antara aparat desa dan warga di Desa Bunder ditunjukkan melalui komunikasi yang egaliter, informal, dan berbasis kekeluargaan. Masyarakat tidak merasa takut atau terpinggirkan dalam forum-forum desa, yang membuat mereka merasa dihargai dan didengarkan.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan program desa Partisipasi warga dalam kegiatan desa seperti festival kali bersih, jalan sehat, lomba-lomba, pelatihan, dan kirim doa menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap aparat desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang berdampak positif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa di Desa Bunder sangat positif. Masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan percaya bahwa aparat desa memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial. Mereka juga menganggap bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Masyarakat merasa bebas memberikan kritik dan saran, serta puas dengan informasi yang diberikan mengenai perkembangan desa. Selain itu, mereka menilai pelayanan yang diberikan oleh aparat desa sudah memadai dan hasil pembangunan yang dilakukan sangat memuaskan. Komunikasi antara masyarakat dan aparat desa juga dianggap mudah dan efektif.

Semua subjek menyatakan bahwa mereka pernah dilibatkan dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial. Terdapat variasi dalam frekuensi undangan, di mana beberapa subjek sering diundang untuk memberikan pendapat, sementara yang lain hanya diundang sekali. Meskipun ada partisipasi, masih ada ruang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Aparat desa memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa memandang status sosial. Ini menunjukkan adanya keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat desa, yang berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Semua subjek merasa bahwa kepala desa dan aparat desa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum. Hal ini mencerminkan integritas dan komitmen aparat desa terhadap keadilan, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di desa.

Kepala desa dan aparat desa tidak mengintervensi penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum. Ini menunjukkan bahwa aparat desa menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk menjaga ketertiban. Semua subjek merasa bahwa kepala desa dan aparat desa mengakomodasi kebutuhan warga dalam penyelesaian sengketa. Ini menunjukkan responsivitas aparat desa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, yang penting.

Warga desa bebas memberikan kritik atau saran terhadap kinerja kepala desa dan aparatnya. Ini mencerminkan adanya ruang untuk umpan balik yang konstruktif, yang penting untuk perbaikan kinerja. Subjek merasa bahwa aparat desa memberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan pembangunan desa. Ini menunjukkan transparansi dalam komunikasi antara aparat desa dan masyarakat, yang penting untuk membangun kepercayaan. Respons terhadap keluhan bahwa aparat desa merespons dengan cepat terhadap keluhan atau masalah yang disampaikan. Ini menunjukkan komitmen aparat desa dalam menangani masalah masyarakat, yang penting untuk menciptakan kepuasan. Pelayanan yang diberikan oleh aparat desa, baik dalam hal administrasi, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Ini mencerminkan kinerja yang baik dari aparat desa dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.

Komunikasi antara aparat desa dan masyarakat berjalan dengan lancar dan terbuka. Ini mencerminkan adanya saluran komunikasi yang efektif, yang penting untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. aparat desa jika ada masalah atau keluhan. Ini menunjukkan bahwa aparat desa approachable dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bersasarkan penelitian yang relevan temuan ini selaras dengan hasil penelitian Dwi Lucita Sari (2016) yang menyebut bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik desa cenderung negatif akibat minimnya pemahaman dan komunikasi antara aparat dan warga. Begitu juga dengan temuan Leni Widiyanti (2020) yang menunjukkan adanya kepuasan warga terhadap pelayanan formal, namun belum mendalami bagaimana pelibatan warga dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan penelitian Donny Prasetyo (2020) yang menekankan konsep masyarakat sebagai entitas aktif dan terorganisasi, realitas di Desa Bunder menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan sebagai mitra sejajar pemerintah desa.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Desa Bunder tergolong cukup baik, terutama dalam aspek pelayanan publik, keterbukaan musyawarah, dan kesetaraan. Namun, terdapat tantangan pada aspek transparansi informasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, yang

menuntut perhatian lebih dari pemerintah desa.

Masyarakat menunjukkan kesadaran dan harapan besar terhadap tata kelola desa yang baik, sehingga aparat desa perlu terus meningkatkan kualitas kinerja mereka berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance agar pemerintahan desa dapat berjalan lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa Bunder di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sangat positif. Masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan, baik dalam hal kesederhanaan proses, kecakapan petugas, maupun keramahan dalam melayani. Meskipun demikian, ada beberapa area yang masih perlu diperbaiki, seperti kejelasan waktu penyelesaian layanan dan pengelolaan beban kerja aparat desa yang tinggi. Dengan beberapa perbaikan dan perhatian terhadap tantangan yang ada, kinerja aparat desa Bunder dapat lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Kesimpulan (11pt, tebal)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat desa dan persepsi masyarakat terhadap prinsip Good Governance di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis terhadap indikator good governance, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Kinerja Aparat Desa Bunder Kinerja aparat desa Bunder dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti:
 1. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi program yang konsisten.
 2. Program pelatihan yang tidak berkelanjutan (tidak ada bantuan alat atau akses pasar).
 3. Kurangnya keterlibatan warga dalam tahap evaluasi.
 4. Keterbatasan pelayanan terhadap kelompok rentan dan belum optimalnya pengelolaan potensi desa secara strategis.
 5. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparat Desa Masyarakat Desa Bunder memiliki persepsi yang dominan positif terhadap kinerja aparat desa. Hal ini dibuktikan melalui:
 - a. Keterlibatan warga dalam musyawarah desa.
 - b. Pelayanan yang dianggap adil dan tidak diskriminatif.
 - c. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan program desa.
 - d. Komunikasi yang terbuka dan suasana kekeluargaan antara warga dan aparat desa.

Meski demikian, terdapat kritik konstruktif dari masyarakat, seperti:

- a. Partisipasi warga yang masih bersifat formalitas, belum menyentuh pengambilan keputusan strategis.
- b. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program, seperti sosialisasi bantuan sosial dan pelatihan.
- c. Lemahnya tindak lanjut dari hasil musyawarah desa.
- d. Belum optimalnya pelibatan kelompok perempuan dalam validasi data bantuan sosial dan pengambilan keputusan.

Penerapan Prinsip Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan kesetaraan sudah mulai diterapkan, namun belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. Aspek partisipasi

masyarakat sudah terbuka, namun perlu ditingkatkan kualitas dan tindak lanjutnya. Transparansi informasi dan evaluasi publik juga perlu diperkuat.

Referensi

- [1]. Adhimah, Syifaul. 2020. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9(1):57–62. doi: 10.21831/jpa.v9i1.31618.
- [2]. Agustin, A., & Khuzaini, K. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(9).
- [3]. Ammons, D. N. (2018). *Performance Measurement for Managing Local Government*. ICMA Press.
- [4]. Anon. 2017. "Jurnal A.Alaslan-Converted (1)." *Jurnal OTONOMI* 10(20):4.
- [5]. Calnen, Gerald. 2010. "Good Governance." *Breastfeeding Medicine* 5(6):323–24. doi: 10.1089/bfm.2010.9977.
- [6]. Dahlan, Rahmat. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(1):1. doi: 10.21043/ziswaf.v4i1.3028.
- [7]. Data, T. P. (2015). Instrumen Penelitian. Kisi-Kisi Instrumen.
- [8]. Dewi, Ni Luh Yulyana. 2019. "Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(2):1–11.
- [9]. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- [10]. Dwi, (, Lucita Sari, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. 2021. *ABSTRAK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK*.
- [11]. Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018, September). Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. In *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage* (Vol. 8, No. 1).
- [12]. Herlina, V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. *Journal Development*, 7(1), 49-59.
- [13]. Haris, O. K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58-83.
- [14]. Iskandar, Y., Suharmiyati, S., & Maralis, R. (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 101-105.
- [15]. Kaehe, Diradimalata, Joorie M. Ruru, and Welson Y. Rompas. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara." *Jurnal Administrasi Publik* 5(80):14–24.
- [16]. Kusmiati, Ati, and Ikbil Irawan. 2021. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA BAJO KECAMATAN SOROMANDI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 6(2):130. doi: 10.31932/jpe.v6i2.1267.
- [17]. Kristiyanti, M. (2012). Peran indikator kinerja dalam mengukur kinerja manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(3).
- [18]. Lembaga Administrasi Negara (LAN), Republik Indonesia. LAN menyusun beberapa

pedoman mengenai penerapan Good Governance di Indonesia, termasuk aspek partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, yang dijelaskan dalam berbagai modul pelatihan untuk aparatur sipil negara.

- [19]. Manajemen, Jurnal Magister, Fakultas Ekonomi, Bisnis Unsyiah, Amelia Dara Sagita, Said Musnadi, M. Shabri, and Abd Majid. 2018. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA." 2(1):13.
- [20]. Prasetyo, Donny. 2020. "MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA." 1(1):164. doi: 10.38035/JMPIS.
- [21]. Pratiwi, nuning. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:213–14.
- [22]. Putri Mardiyasari dan Supriyadi, Diah. 2015. *Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul*. Vol. 4. yogyakarta.
- [23]. Rachmawati, I., & Hidayah, N. (2021). *Nilai Sosial dan Kinerja Pemerintah Desa dalam Perspektif Masyarakat Perdesaan*. Jurnal Sosial Humaniora.
- [24]. Ressi, A. 2018. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." ... *Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten*
- [25]. Safitri, Amalia Eli, Joko Pramomo, and Ambar Istiyani. 2023. "Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang." *Jurnal IMAGINE* 3(1):1–11.
- [26]. Samosir, Magdalena Silawati. 2022. "Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 (Studi Kasus Pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7(3):178–83. doi: 10.5281/zenodo.4916444.
- [27]. Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2019). *Consumer Behavior*. Pearson.
- [28]. Shandi, Ivanna Frestilya Ari. 2020. "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* 92.
- [29]. Sismono, Herman. 2020. "Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur." *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 8(2):70–78. doi: 10.24127/pro.v8i2.3312.
- [30]. Sugiman, Sugiman. 2018. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7(1):83. doi: 10.37893/jbh.v7i1.16.
- [31]. Sari, D. L., Hasyim, A., & Nurmalis, Y. (2016). *Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- [32]. Sari, D. (2012). *Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah*.
- [33]. UNESCAP. (2020). *What is Good Governance?*
- [34]. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

- [35]. Wanto, H. A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *of Public Sector Innovations*, 2, 4.
- [36]. World Bank. (2021). *Worldwide Governance Indicators*.
- [37]. World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's Experience*. Washington, D.C.: World Bank. Dalam publikasi ini, World Bank memberikan definisi dan konsep Good Governance dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan yang efektif.